

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

H. Basuki Rachmat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

As reform going on governance systems in the country, based on the act of 32 of 2004, and revised into a law 23 2014, to be more empower institutional capacity sub district as an element government institutions, adjacent and touch directly with the community, after village, so to the implementation of the regional otonomi berazaskan decentralization, where regional given the authority to manage their own household by doing government administration, development and services for the community. Where sub district to the regional work, the funding source of sub district n supported and comes from the provincial, districts. No longer comes from the national budget.

As logical consequence, sub district is required to list plan needs that poured into planning documents and budgeting, of course through a process mechanism musrenbang first.

By involving participation the community and the komponen good the apparatus sub district, community leaders, and implementing units the uptd in sub district, so that writer interested to have a research on how policy management apbd sub district ciomas 2015.

As for this research uses the method the qualitative study deskriptif with the approach inductive.

Keywords: Analisis Budget, management policies, sub-district ciomas.

PENDAHULUAN

Di saat kecamatan masih sebagai wilayah administrasi pemerintahan dalam rangka asas dekonsentrasi, sumber pendanaan kantor Kecamatan di Indonesia, bersumber dari APBN dan bantuan dari APBD (Provinsi dan kabupaten/kota). Seiring berjalan reformasi tata kelola sistem pemerintahan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, untuk lebih memberdayakan kapasitas kelembagaan kecamatan

sebagai unsur lembaga pemerintahan, yang berdekatan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, setelah desa, maka dengan pelaksanaan otonomi daerah berazaskan desentralisasi, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan menjadi wilayah kerja perangkat daerah, sumber pendanaan kecamatan didukung dan bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota. Tidak lagi bersumber dari APBN.

Sebagai konsekuensi logis, Kecamatan diwajibkan untuk menyusun rencana kebutuhan yang dituangkan kedalam dokumen perencanaan dan Penganggaran, tentunya melalui proses mekanisme musrenbang terlebih dahulu. Dilaksanakannya Musrenbang pada tingkat Kecamatan adalah untuk mendapatkan dan mengajak masyarakat dan seluruh komponen yang ada dalam lingkungan Kecamatan untuk turut berpartisipasi menyusun secara bersama-sama tentang kebutuhan masyarakat, untuk dijadikannya sebagai program dan kegiatan Kecamatan yang akan diajukan kepada Kabupaten/Kota. Tugas pokok dan fungsi unit kerja merupakan dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja perangkat daerah.

Menurut Mardiasmo (2002: 9) perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah, meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah;
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran parapartisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya;

4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan pegawai negeri sipil daerah, birokrasi maupun dasar pertimbangannya.
6. Kejelasan tentang bentuk dan struktur anggaran, kinerja dan anggaran multi tahunan;
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, tentang "Analisis Kebijakan Pengelolaan APBD di Kecamatan Ciomas Tahun 2015".

Dari berbagai fenomena yang peneliti cermati dan dapatkan di Kecamatan

Ciomas, tentang Pengelolaan APBD, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana di Kecamatan Ciomas;
2. Keterbatasan dukungan sumber daya aparatur (MSDA) Kecamatan Ciomas;
3. Kultur dan Budaya Kerja Aparatur Kecamatan Ciomas;
4. Keterbatasan alokasi anggaran Kecamatan setiap Tahunnya;
5. Kurangnya disiplin Aparatur Kecamatan dalam bekerja kesehariannya;
6. Kurangnya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Pengelolaan Keuangan Kecamatan.

Pembatasan Masalah

Dengan Keterbatasan waktu yang peneliti miliki, sehingga peneliti membatasi permasalahan, hanya terkait dengan judul Penelitian yang peneliti lakukan yaitu Analisis Kebijakan Pengelolaan APBD Kecamatan Ciomas Tahun 2015.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pengelolaan APBD Kecamatan Ciomas Tahun 2015.
2. Bagaimana ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Ciomas.
3. Bagaimana Alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun 2015, bagi dukungan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini, peneliti bermaksud ingin melakukan sebuah tulisan ilmiah dan ingin mengetahui seberapa besar peran APBD dalam mengatasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ciomas Tahun 2015.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan Pengelolaan APBD Kecamatan Ciomas Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Ciomas.
3. Untuk mengetahui besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun 2015.

DESAIN PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih andal. Menurut Newman dalam Silalahi (2009: 5) bahwa "*The findings from research yield better informed, less biased decisions than the guessing, hunches, intuition, and personal experiences that were previously used*". (Temuan dari hasil penelitian lebih baik daripada informasi, keputusan kurang dari pada menebak menebak, firasat, intuisi, dan pengalaman pribadi yang sebelumnya digunakan). Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

Menurut Nasir (2011: 54) metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu status kelompok manusia, suatu objek, suatu pemikiran/penulisan atau peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang menjadi objek penelitian. Lebih Lanjut Whitney, (dalam Nazir 2011: 54) menyatakan “ penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Selanjutnya Nasution (2012: 38) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut juga kualitatif karena data yang dikumpulkannya bercorak kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian natural atau wajar sebagaimana adanya manipulasi yang diatur dengan eksperimen atau uji coba.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah suatu metode dalam suatu objek dengan membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data-data yang bercorak kualitatif dalam lapangan penelitian yang wajar sebagaimana adanya atau natural. Pengertian pendekatan induktif menurut Sagala (2010: 68) “dalam konteks pembelajaran pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu prinsip atau aturan”

Berdasarkan uraian yang tersebut, peneliti mengambil keputusan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu metode penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran dengan menitik beratkan apa yang terjadi dan menjadi fokus saat dilakukan penelitian, kemudian digambarkan secara sistematis, dikaji dan dianalisis sedemikian rupa secara lebih mendalam lalu ditarik kesimpulan yang menggambarkan secara umum.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada suatu penelitian diperoleh melalui metode-metode dan sumber-sumber tertentu. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh penulis dalam mencapai tujuan penelitian.

Menurut Silalahi (2012: 291) bahwa “Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Dalam hal ini pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan karena data yang diambil tersebut setelah dikumpulkan dan disatukan akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan”.

Pengumpulan data menurut Creswell (2009: 60) “*puts forward the first step in the process of data collection in qualitative research is to find people or places to explore and to get access and build rapport (good relationship)*”. (mengedepankan langkah pertama dalam proses pengumpulan data

dalam penelitian kualitatif itu menemukan orang atau tempat untuk mengeksplorasi dan untuk mendapatkan akses dan membangun hubungan).

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari nara sumber.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln dalam Gunawan (2015: 161) mengemukakan:

"The interview is a conversation, the art of asking questions and listening. It is not neutral tool, for the interviewer creates the reality of the situation. In this situation answers are given. Thus the interview produces situated understandings grounded in specific interactional episodes. This method is influenced by the personal characteristics of the interviewer, including race, class, ethnicity, and gender". (Wawancara adalah bentuk percakapan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam situasi ini pertanyaan akan diberikan. Interview menciptakan landasan pemahaman interaksi. Metode ini dipengaruhi oleh karakteristik personal dari penginterview, ras, kelas, etnik, dan gender).

Menurut Creswell (2009: 267) bahwa "dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan *face to face interview* (berhadapan langsung) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon,

atau terlibat dalam *focus group interview* yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan.

Wawancara menurut Ranjit Kumar (2011: 140) yaitu *"interviewing is a commonly used to method of collecting information from people. In many walks of life we collect information through different forms of interactions with others"*. (wawancara adalah metode umum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang. Dalam banyak bidang kehidupan kita mengumpulkan informasi melalui berbagai bentuk interaksi dengan orang lain).

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam kegiatan magang ini, melalui wawancara penulis berusaha untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara terperinci tentang Pengelolaan APBD Kecamatan Ciomas dari responden:

- a. Camat Ciomas;
- b. Sekretaris Camat Ciomas
- c. Kepala Seksi Keuangan Kecamatan Ciomas;
- d. Bendahara Kecamatan Ciomas.

Dokumentasi

Selain itu, Ibrahim (2015: 93) juga menambahkan "Dokumen adalah sebagai bukti kegiatan seorang peneliti, pada bentuk kedua dokumen merupakan sumber yang memberikan data atau informasi atau fakta kepada peneliti, baik itu catatan, foto, rekaman video maupun lainnya".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, secara garis besar dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data

yang dilakukan dengan melihat, mencatat dari sumber-sumber tertulis.

Teknis Analisis Data

Kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian, sebab data mentah yang telah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak dianalisis.

Menurut Creswell (2007: 148) bahwa *“Data analysis in qualitative research consists of preparing and organizing the data (i.e., text data as in transcript, or image data as in photography) for analysis, then reducing the data infor themes through a process of coding and condensing the codes, and finally representing the data in figures, tables or discussion”* (Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari mempersiapkan dan mengatur data untuk analisis, info data melalui proses kode dan akhirnya mewakili data dalam gambar dan tabel atau diskusi).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. sehingga datanya sudah jenuh”. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Diperkuat kembali oleh pendapat dari Nasution (1988) bahwa “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.

Menurut Spradley (1980) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* karangan Sugiyono menyatakan bahwa *“Analysis of any kind involve a way of thinking. it refers to the systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the relationship to the whole”* (Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola).

3. *Conclusion Drawing/Verification (Verifikasi)*

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sesuai metode penelitian, dan ruang lingkup sosial yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian juga akan memuat berbagai aspek yang akan diteliti dan dari objek objek tertentu untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian.

Kerangka Pemikiran

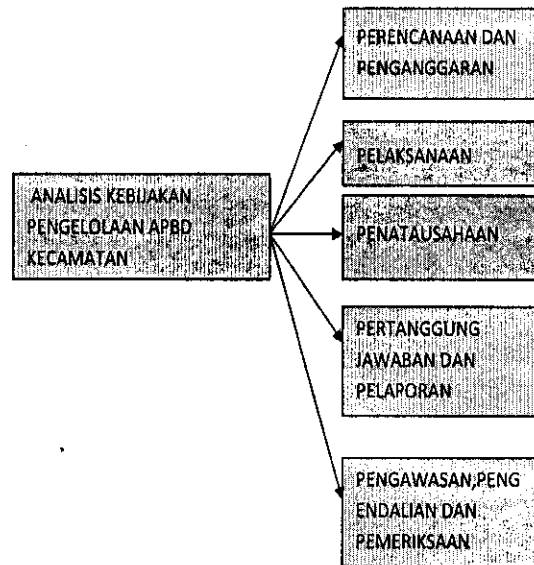
Adapun kerangka pemikiran yang menjadi acuan penulis adalah:

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan tergambar seperti gambar.

Keterangan Kerangka pikir:

- a. Bagaimana kebijakan dalam rangka melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran awal, tentunya, melalui mekanisme musrenbang yang dilakukan oleh jajaran Kecamatan, dengan pola perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur baik masyarakat, jajaran aparatur

kecamatan dan UPTD yang berada di bawah kewenangan Kecamatan, akan menghasilkan sebuah perencanaan dan penganggaran yang baik dan memenuhi semua kebutuhan semua pihak.



Sumber: Permendagri 13 Tahun 2006 diolah peneliti.

- b. Pada aspek pelaksanaan anggaran, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, atau sebagai SKPD, tentunya di dalam melaksanakan program dan kegiatan harus mengikuti apa yang telah digariskan dalam APBD dan DPA Kecamatan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Pertanggungjawaban dan pelaporan yang dilakukan oleh jajaran pelaksana pengelola keuangan kecamatan, berdasarkan Pedoman dan peraturan yang berlaku dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d. Camat sebagai Kepala Kantor harus melakukan pengawasan melekat, kepada para pejabat pengelola Keuangan Kecamatan, dan bertanggung jawab secara langsung

atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

TINJAUANTEORITIS

Pengertian APBD

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah.

Bila kita mendalami manajemen, di mana manajemen mempunyai beberapa fungsi yang meliputi: fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengendalian, pengawasan dan fungsi pemeriksaan. Sedangkan pengelolaan identik dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Berdasarkan pendapat para ilmuwan: *Encyclopedia of the Social Science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

Selain itu, ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai Ilmu Manajemen ini, adapun gagasan para ahli tersebut di antaranya yaitu:

1. Mary Parker Follet

Menurut Mary Parker Follet, pengertian dari manajemen adalah sebagai suatu seni yang tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang lain.

Definisi ini dapat kita lihat dari seorang CEO Perusahaan yang harus mampu mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

2. George R. Terry, Ph.D

Manajemen dapat diartikan sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Ia juga berpendapat bahwa manajemen merupakan ilmu sekaligus seni, yang definisinya adalah suatu wadah di dalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya.

3. Koontz

Manajemen menurut Koontz merupakan seni yang produktif dengan didasarkan pada suatu pemahaman ilmu. Ia juga menambahkan bahwa ilmu dan seni tidaklah bertentangan melainkan masing-masing saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

Teori Kebijakan

Beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan

menurut Edi Suharto (2008: 7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn, adalah sebagai berikut:

Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach,

1980; Hogwood dan Gunn, 1986) di antaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis;
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. Menjangkau dampak yang amat luas;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
6. menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa

tindakan pemerintah yang sah. Untuk mendukung rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun banyak sekali hal-hal yang tersirat(kontekstual) yang tidak diketahui oleh public dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat berperan untuk dapat menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada.

Inilah dua tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni publik/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang megakibatkan kebijakan pun berubah-ubah.

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan

a. Kecamatan Ciomas memiliki luas 48,53 Km² dengan batas-batas kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara:
Kecamatan Pabuaran
- Sebelah Selatan:
Kecamatan Pandeglang
- Sebelah Barat:
Kecamatan Padarincang
- Sebelah Timur:
Kecamatan Baros.

Ibu Kota Kecamatan Ciomas terletak pada jarak 26 Km dari Ibu Kota Kabupaten Serang dan 15 Km Juga Ibu Kota Provinsi Banten. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Ciomas sebagian besar merupakan dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata: 242-483 m dari permukaan laut, dengan curah hujan 3677 mm/tahun.

b. Keadaan Demografis

Secara administrasi Wilayah Kecamatan Ciomas terdiri dari 11 Desa, yang terbagi menjadi 52 Rukun Warga (RW) dan 149 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk secara/menurut jenis kelamin, yang terdiri dari 19.778 jiwa penduduk laki-laki dan 18.591 jiwa penduduk perempuan. Total 38.369 jiwa

Kecamatan Ciomas membawahi 11 Desa terdiri dari:

1. Ujung Tebu
2. Siketug
3. Lebak
4. Pondok Kahuru
5. Sukabares
6. Sukarena
7. Sukadana
8. Citaman
9. Cemplang
10. Cisitu
11. Panyaungan Jaya

c. Sarana Pemerintahan Kecamatan

1. Kantor Pemerintah Kecamatan Ciomas

Luas Tanah:
2,326,74m² (P.49,40 - L.47,10)

Luas Bangunan:
389,86m² (P.20,20 - L.19,30)

2. Gedung PKK

Luas Bangunan:
42,3m² (P.20,20-L.19,30)

3. Rumah Jabatan Camat

Status Rumah jabatan Camat:
Milik Pemerintah

Luas Bangunan:
90,78m² (P.10,2 - L.8,9m)

4. Instansi/UPTD Pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan Ciomas:

1. KORAMIL
2. POLSEK
3. UPTD PENDIDIKAN
4. UPTD PUSKESMAS DTP
5. GEDUNG PGRI
6. K U A
7. UPTD KB PKS
8. UPTD PERTANIAN
9. UPTD PERTERNAKAN
10. POS INDONESIA21-
11. BPP KECAMATAN.

5. Jumlah Pegawai Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Ciomas

Menurut Status Pegawai di Kecamatan Ciomas Tahun 2013

Kecamatan/ Desa/Kelurahan	PNS		Tenaga Honorar/ PTTD		TKS/ Non PNS	
	L	P	L	P	L	P
UPTD Pendidikan	10	3	3	-	-	-
UPTD Pertanian	1	-	-	-	-	-
Puskesmas	7	14	-	6	2	-
Kantor Urusan Agama	2	1	4	-	-	5
UPTD KB	10	1	-	-	1	-
Kecamatan Ciomas	20	-	-	-	-	2
Polsek	17	-	-	-	-	-
Koramil	-	-	-	-	3	-
UPTD PDAM UPK	-	-	-	-	-	-
PNPM	-	-	-	-	-	-

6. Kependudukan

Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciomas Tahun 2013, sebanyak 38.369, terdiri dari Lelaki sejumlah 19. 778, perempuan sejumlah 18.591. jiwa.

Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Ciomas tahun 2013

- a. Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 3.139 kepala keluarga;

- b. Keluarga Sejahtera I sebanyak 4.851 Kepala Keluarga;
- c. Keluarga Sejahtera II sebanyak 1.809 Kepala keluarga;
- d. Keluarga Sejahtera III sebanyak 499 Kepala Keluarga;
- e. Keluarga Sejahtera IV sebanyak 181 Kepala Keluarga.

Jumlah Keluarga Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ciomas Tahun 2013 Keluarga penerima bantuan program keluarga harapan sebanyak 621 Kepala Keluarga.

7. APBD Kecamatan Tahun 2015 tergambar sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- a. Belanja Pegawai
Rp.1.704.904.899.-
- b. Belanja Barang/Jasa
Rp. 595.407.700.-
Jumlah Rp. 2.356.704.899.-
- c. Belanja Modal
Rp. 56.392.300.-
Jumlah seluruhnya
Rp. 2. 412.097.199.-

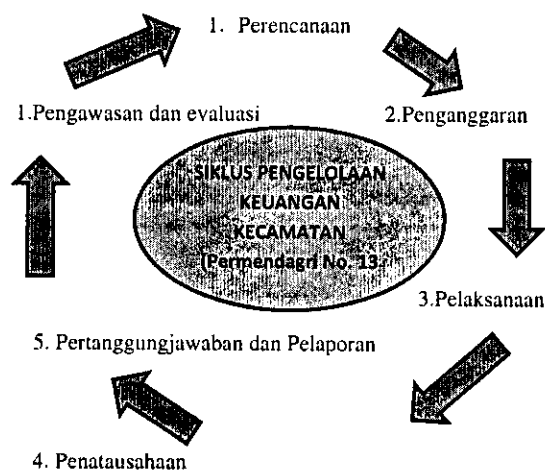
Pembahasan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama kurang lebih satu bulan di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten, penulis mendapatkan bahwa anggaran yang diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang kepada Kecamatan Ciomas dikelola dengan baik, berdasarkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA), Kecamatan Ciomas Tahun 2015.

Namun demikian dengan anggaran yang sangat terbatas, Kecamatan Ciomas belum dapat memenuhi kekurangan dukungan sarana dan prasarana, berupa tambahan beberapa perangkat komputer bagi Seksi-seksi dan staf pelaksana, sehingga pelaksanaan pekerjaan hanya bertumpu kepada komputer yang ada, yang dipakai bersama-sama, sehingga target penyelesaian pekerjaan belum memenuhi target yang diinginkan.

Keterbatasan jumlah pegawai yang berada di setiap seksi-seksi, di mana setiap seksi tidak ada bawahannya yang dapat ditugasi sebagai pelaksana pekerjaan semua dilakukan oleh Kepala Seksi, jelas ini kurang sehat dari segi organisasi. Terbatasnya staf atau tenaga yang memiliki kemampuan yang mempunyai kompetensi untuk mengoperasikan komputer secara baik dan benar. Hanya ada beberapa yang menguasai penggunaan komputer, itupun menjabat sebagai Kepala Seksi. Jelasnya setiap Kepala Seksi tidak memiliki staf yang dapat membantunya.

Siklus Pengelolaan Keuangan Kecamatan



Secara garis besar, siklus pengelolaan

keuangan kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pada siklus ini berisi:
 1. Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan,
 2. Penyusunan Renstra Kecamatan (periode 5 tahunan),
 3. Penyusunan Renja Kecamatan (periode 1 tahunan).
- b. Penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan Anggaran

Kecamatan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Kecamatan

Pendapatan kecamatan adalah semua unsur pendapatan asli daerah yang pendapatan Daerah Dan APBD yang bersumber dari Kabupaten dan Kota pemungutannya didelegasikan kepada Camat dan disetorkan ke Kas Umum daerah sebagai pendapatan daerah yang berkontribusi kepada APBD Daerah.

2. Belanja Kecamatan;

Belanja kecamatan terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

- 1). Belanja tidak langsung adalah belanja (pengeluaran) yang tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah

- e. Belanja bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil
- g. Belanja bantuan keuangan
- h. Belanja tidak terduga

- 2). Belanja langsung adalah belanja (pengeluaran) yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

3. Pembiayaan Kecamatan

- Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja
- $\text{Pendapatan} > \text{Belanja} = \text{surplus} \rightarrow \text{dipakai untuk apa}$
- $\text{Pendapatan} < \text{Belanja} = \text{defisit} \rightarrow \text{ditutup dari mana}$

Untuk anggaran kecamatan tidak disarankan ada defisit, kecuali untuk pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit dsb.

- c. Penatausahaan Keuangan Kecamatan

- 1). Penatausahaan Penerimaan

Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan.

- 2). Penatausahaan Pengeluaran

Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

d. Pertanggungjawaban dan pelaporan

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Camat wajib menyusun pertanggungjawaban dan melaporkan atas pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

e. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan keberhasilan dari suatu pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tanggung jawab Camat dan jajaran terkait dari masing-masing pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kecamatan, Fungsi waskat harus dapat berjalan secara efektif, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari.

f. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah untuk melihat sejauhmana perkembangan antara perencanaan dan capaian.

Pengelolaan keuangan terhadap APBD yang dimiliki Kecamatan Ciomas pada Tahun 2015 dibelanjakan habis untuk kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Kecamatan Tahun 2015.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan APBD Kecamatan Tahun 2015, sesuai dengan apa yang teralokasi pada APBD dan DPA Kecamatan Tahun 2015 serta digunakan berdasarkan kebutuhan mendukung operasional tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab

Kecamatan, dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Anggaran Kecamatan Ciomas setiap tahunnya sangat terbatas, bahkan bila dibandingkan dengan anggaran Desa yang ada di Kecamatan Ciomas, Anggaran Kecamatan masih terlalu kecil. Besaran anggaran Kecamatan Tahun 2015 sebesar Rp.2.412.097.199.- Dan telah direalisasikan untuk memenuhi atau membiayai:

a. Belanja Pegawai
Rp.1.704.904.899.-

b. Belanja Barang/Jasa
Rp. 595.407.700.-

Jumlah Rp. 2.356.704.899.-

c. Belanja Modal
Rp. 56.392.300.-

Jumlah seluruhnya
Rp. 2. 412.097.199.-

3. Keterbatasan sumber daya aparatur Kecamatan, yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan Komputer. Di mana tidak adanya staf di setiap Kepala Seksi di Kecamatan Ciomas, sehingga pelaksana pekerjaan dikerjakan sendiri oleh Kepala Seksi, dan ini merupakan organisasi yang kurang sehat, karena tidak ada kontrol secara berjenjang.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Disarankan walaupun dalam pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan APBD Kecamatan Ciomas telah sesuai dengan alokasi dana yang

dianggarkan dalam APBD dan DPA, Kecamatan Tahun 2015, perlu dilakukan kajian ulang atas besaran alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang tercantum dalam APBD dan DPA Kecamatan khususnya belanja modal, terlihat alokasinya sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor, dan merehab gedung kantor serta rumah dinas Camat yang letaknya bersebelahan dengan kantor Kecamatan.

2. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kedepan, upayakan adanya penambahan alokasi anggaran Kecamatan Ciomas, khususnya alokasi anggaran belanja modal.
3. Kekurangan staf pelaksana, se-jogyanya Kecamatan mengajukan usulan penambahan pegawai bagi staf pelaksana di setiap kepala seksi, agar setiap kepala seksi memiliki staf, sehingga adanya *check and balances* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alimudin. 2012, *KASUS Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran SKPD*, PPKED Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Makasar.
- Nordiawan, Deddi 2006 *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat Jakarta
- Gie, The Liang, (1968), *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid III*, Gunung Jakakarta
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada SKPD dan BLU*. Indeks Jakarta 2009.
- Mardiasmo “ Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasi Value For Money
- Mahmudi Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta Erlangga, 2010
- H.AkmalBoedianto. Membangun APBD Partisipatif pada Era Otonomi Daerah. ITS.Press Surabaya 2010.
- Newman dalam Silalahi (2009: 5), Metode Penelitian Kualitatif.
- Nasir (2011: 54) metode deskriptif.
- Nasution (2012: 380), metode kualitatif deskriptif.
- Silalahi (2012: 291) bahwa “Metode pengumpulan data.
- Creswell (2009: 267), Metode wawancara.
- Ranjit Kumar (2011: 140) Metode Wawancara.
- Creswell (2007: 148), Tehnik Analisis Data.
- Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007), Analisis Data Kualitatif.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengendalian Keuangan Negara/Daerah.